



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cirebon adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 17 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Cirebon.
6. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2014-2018; dan
 - b. IKU SKPD.

- (2) IKU Pemerintah Kota Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kota Tahun 2014-2018 mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2013-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Kota Tahun 2014-2018 dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. IKU Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja SKPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 – 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018

No	Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan		
Misi 1 Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius								
1	1	1	Meningkatkan nilai keimanan dan ketaqwaan pada aparatur pemerintahan	Rasio SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin tiap bulan dibagi seluruh SKPD	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah SKPD yang melaksanakan kegiatan keagamaan rutin setiap bulan/Jumlah seluruh SKPD
1	2	1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Jumlah sarana peribadatan yang memperoleh bantuan/Jumlah sarana peribadatan total

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	2	Terwujudnya prestasi Kota Cirebon dalam bidang keagamaan	Prestasi lomba keagamaan 3 besar tingkat provinsi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Tahun 2013 : peringkat 11 Tahun 2014 : peringkat 9 Tahun 2015 : peringkat 7 Tahun 2016 : peringkat 6 Tahun 2017 : peringkat 4 Tahun 2018 : peringkat 3
1	2	3	Terpeliharanya suasana kerukunan hidup antar umat beragama yang harmonis dan saling menghargai terhadap ajaran agamanya masing-masing	Tidak adanya kasus konflik yang bernuansa agama	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Mempertahankan kondisi 0 kasus yang bernuansa SARA sampai dengan tahun 2018
Misi 2 Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN								
2	1	1	Terwujudnya aparatur daerah yang memiliki integritas dan profesional	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	Laporan hasil monev	Jumlah Pejabat yang Telah Mengikuti Diklatpim/Jumlah Pejabat Total

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	Laporan hasil monev	Tahun 2013 : 9/1000 Tahun 2014 : 7/1000 Tahun 2015 : 6/1000 Tahun 2016 : 5/1000 Tahun 2017 : 4/1000 Tahun 2018 : 3/1000
2	1	2	Terwujudnya tertib administrasi keuangan SKPD	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan hasil pemeriksaan BPK	Tahun 2013 : WDP Tahun 2014 : WDP Tahun 2015 : WDP Tahun 2016 : WTP Tahun 2017 : WTP Tahun 2018 : WTP
				Meningkatnya kesesuaian APBD dengan dokumen perencanaan 100%	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Evaluasi Monev	Tahun 2013 : 90% Tahun 2014 : 100% Tahun 2015 : 100% Tahun 2016 : 100% Tahun 2017 : 100% Tahun 2018 : 100%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2	1	3	Terwujudnya tertib administrasi kearsipan daerah	Meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Laporan Hasil Monev	Jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan/ jumlah SKPD Target : 14 SKPD/tahun
				Meningkatnya arsip vital dan arsip statis	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tahun 2013 : 530 arsip Tahun 2014 : 630 arsip Tahun 2015 : 730 arsip Tahun 2016 : 840 arsip Tahun 2017 : 950 arsip Tahun 2018 : 1160 arsip
2	1	4	Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 75 poin Tahun 2014 : 75 poin Tahun 2015 : 80 poin Tahun 2016 : 85 poin Tahun 2017 : 90 poin Tahun 2018 : 95 poin
				Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	Laporan Data Investasi PMA/PMDN Tahunan	Tahun 2013 : PMA Rp. 212,574 M PMDN Rp. 380,825 M Tahun 2014 : PMA Rp. 250 M PMDN Rp. 425 M Tahun 2015 : PMA Rp. 280 M PMDN Rp. 475 M Tahun 2016 : PMA Rp. 325 M

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
								PMDN Rp. 525 M Tahun 2017 : PMA Rp. 360 M PMDN Rp. 560 M Tahun 2018 : PMA Rp. 400 M PMDN Rp. 600 M
2	1	5	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	Tahun 2013 : 80 poin Tahun 2014 : 80 poin Tahun 2015 : 80 poin Tahun 2016 : 85 poin Tahun 2017 : 85 poin Tahun 2018 : 90 poin
2	2	1	Terwujudnya kesesuaian struktur dan tatalaksana SKPD	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di tahun 2018	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Monev Kelembagaan	Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan/ jumlah SKPD Tahun 2013 : 76 % Tahun 2014 : 81 % Tahun 2015 : 86 % Tahun 2016 : 90 % Tahun 2017 : 95 % Tahun 2018 : 100 %

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
2	3	1	Tercapainya kesepakatan penetapan batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	Seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) disepakati 100 %	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah	Kesepakatan Batas Wilayah	Tahun 2013 : 0 titik Tahun 2014 : 0 titik Tahun 2015 : 0 titik Tahun 2016 : 0 titik Tahun 2017 : 8 titik Tahun 2018 : 8 titik
2	4	1	Penataan sistem manajemen dan proses kinerja dilingkungan pemerintah kota dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Tersedianya peraturan-peraturan tentang e-government 100%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan	Tahun 2013 : 80% Tahun 2014 : 84% Tahun 2015 : 88% Tahun 2016 : 92% Tahun 2017 : 96% Tahun 2018 : 100%
				Terpenuhinya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur 100%	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan	Tahun 2013 : 34 sistem Tahun 2014 : 36 sistem Tahun 2015 : 40 sistem Tahun 2016 : 44 sistem Tahun 2017 : 46 sistem Tahun 2018 : 50 sistem

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum								
3	1	1	Terwujudnya persatuan dan kesatuan dalam kebineka tunggal-ika-an	Menurunnya kejadian kriminalitas karena ras dan agama 0 kasus	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan Kejadian Tahunan	Mempertahankan angka kriminalitas karena ras dan agama sampai dengan tahun 2018 : 0 kasus
3	2	1	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum	Menurunnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum 15% setiap tahun dari 45 titik	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Laporan Penertiban Tahunan	Tahun 2013 : 45 titik Tahun 2014 : 45 titik Tahun 2015 : 40 titik Tahun 2016 : 30 titik Tahun 2017 : 20 titik Tahun 2018 : 10 titik
3	3	1	Menurunnya tingkat pelanggaran perda	Tingkat pelanggaran perda turun 20% dari 30 Perda bisa ditegakkan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Monev Tahunan	Tahun 2013 : 10 kasus Tahun 2014 : 10 kasus Tahun 2015 : 9 kasus Tahun 2016 : 8 kasus Tahun 2017 : 7 kasus Tahun 2018 : 5 kasus
3	4	1	Terwujudnya RW K-3	Proporsi RW yang memenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %	Lingkungan Hidup	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan Monev Tahunan	Jumlah RW K-3/jumlah RW total Tahun 2013 : 10 % Tahun 2014 : 10 % Tahun 2015 : 20% Tahun 2016 : 30% Tahun 2017 : 40% Tahun 2018 : 50%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
3	5	1	Menurunnya titik rawan kemacetan dan kecelakaan	Menurunnya jumlah titik rawan kemacetan dan daerah rawan kecelakaan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Laporan Monev Tahunan	Tahun 2013 : 10 titik Tahun 2014 : 10 titik Tahun 2015 : 9 titik Tahun 2016 : 8 titik Tahun 2017 : 7 titik Tahun 2018 : 5 titik
3	6	1	Tertatanya sektor informal	Rasio jumlah PKL yang menempati lokasi di luar ketentuan dibagi/jumlah PKL seluruhnya =0,3	Perdagangan	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 60% Tahun 2014 : 60% Tahun 2015 : 50% Tahun 2016 : 45% Tahun 2017 : 40% Tahun 2018 : 30%
3	7	1	Meningkatnya daya tanggap terhadap bencana	Tingkat waktu tanggap kejadian bencana (TKB) dan waktu tanggap darurat bencana (TDB)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari Tahun 2014 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari Tahun 2015 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari Tahun 2016 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari Tahun 2017 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari Tahun 2018 : TKB = 7 menit ; TDB = 7 hari

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
Misi 4 Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat								
4	1	1	Terbukanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan	Meningkatnya Lama Harapan Sekolah pada usia max 18 tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 13 tahun Tahun 2014 : 14 tahun Tahun 2015 : 15 tahun Tahun 2016 : 16 tahun Tahun 2017 : 17 tahun Tahun 2018 : 18 tahun
				Rata - rata lama sekolah (13 Tahun)	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 10,86 tahun Tahun 2014 : 11 tahun Tahun 2015 : 11,5 tahun Tahun 2016 : 12 tahun Tahun 2017 : 12,5 tahun Tahun 2018 : 13 tahun
4	2	1	Meningkatnya indeks kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup 71,1 tahun	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 69,8 tahun Tahun 2014 : 69,8 tahun Tahun 2015 : 70,11 tahun Tahun 2016 : 70,45 tahun Tahun 2017 : 70,75 tahun Tahun 2018 : 71,10 tahun
4	2	2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya Peserta KB Aktif 75% di tahun 2018 dari jumlah PUS	Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013 : 60 % Tahun 2014 : 63 % Tahun 2015 : 66% Tahun 2016 : 69% Tahun 2017 : 72% Tahun 2018 : 75%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4	3	1	Berprestasi di tingkat propinsi	Meraih posisi 10 besar tingkat propinsi di tahun 2018	Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Kegiatan	Tahun 2013 : peringkat 18 Tahun 2014 : peringkat 18 Tahun 2015 : peringkat 16 Tahun 2016 : peringkat 14 Tahun 2017 : peringkat 12 Tahun 2018 : peringkat 10
4	4	1	Meningkatnya jumlah pusaka budaya yang dilestarikan	Rasio keaktifan kelompok seni budaya 50% di tahun 2018 dari 30% di tahun 2012	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Kegiatan	Tahun 2013 : 30 % Tahun 2014 : 30 % Tahun 2015 : 35% Tahun 2016 : 40% Tahun 2017 : 45% Tahun 2018 : 50%
				Jumlah pusaka budaya yang ditetapkan 80 Jenis (72 bangunan cagar budaya di tahun 2012)	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Kegiatan	Tahun 2013 : 72 jenis Tahun 2014 : 72 jenis Tahun 2015 : 74 jenis Tahun 2016 : 76 jenis Tahun 2017 : 78 jenis Tahun 2018 : 80 jenis
4	5	1	Meningkatnya indeks daya beli masyarakat	Indeks daya beli dari 62,35 menjadi 65 point	Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	Laporan Hasil Kegiatan	Tahun 2013 : 62,35 Tahun 2014 : 62,88 Tahun 2015 : 63,41 Tahun 2016 : 63,94 Tahun 2017 : 64,47 Tahun 2018 : 65
					Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Laporan Hasil Kegiatan	
					Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Hasil Kegiatan	

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
					Pertanian, Kehutanan, Kelautan Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	Laporan Hasil Kegiatan	
				Meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara 25% tahun 2018	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Laporan Hasil Monev	Tahun 2013: 355.967 orang Tahun 2014: 373.767 orang Tahun 2015: 391.567 orang Tahun 2016: 409.367 orang Tahun 2017: 427.167 orang Tahun 2018: 444.959 orang
4	6	1	Menurunnya jumlah KK miskin	rasio KK miskin dibandingkan dengan KK kota dari 30,24% menjadi 25%	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pusat Statistik	Jumlah penduduk miskin/ Jumlah penduduk total Tahun 2013 : 30,24 % Tahun 2014 : 29,19 % Tahun 2015 : 28,14% Tahun 2016 : 27,09% Tahun 2017 : 26,04% Tahun 2018: 25%
				Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			
				Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana			

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
					Pendidikan	Dinas Pendidikan		
					Kesehatan	Dinas Kesehatan		
					Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral		
					Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral		
					Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah		
4	7	1	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah kasus dari 30 kasus menjadi 20 kasus	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan Monev Tahunan	Tahun 2013 : 30 kasus Tahun 2014 : 28 kasus Tahun 2015 : 26 kasus Tahun 2016 : 24 kasus Tahun 2017 : 22 kasus Tahun 2018 : 20 kasus
4	8	1	Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penurunan PMKS 5 % di Tahun 2018	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan Monev Tahunan	Tahun 2013: 30.895 orang Tahun 2014: 30.407 orang Tahun 2015: 29.919 orang Tahun 2016: 29.431 orang Tahun 2017: 28.943 orang Tahun 2018: 28.456 orang

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
4	9	1	Terpenuhinya kesetaraan gender	Rasio gender di atas 30% perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		Tahun 2013 : 30 % Tahun 2014 : 32 % Tahun 2015 : 34% Tahun 2016 : 36% Tahun 2017 : 38% Tahun 2018 : 40%
Misi 5 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan								
5	1	1	Meningkatnya Proporsi Pembiayaan Pembangunan yang berasal dari Musrenbang Kecamatan	Persentase kenaikan nilai Musrenbang Kecamatan yg diakomodir dalam APBD sebanyak 5 % sampai akhir tahun 2018 (kumulatif)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Atau Perencanaan Pembangunan Daerah	- Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Tahun 2013 : 1,5% APBD Tahun 2014 : 2,2% APBD Tahun 2015 : 2,9% APBD Tahun 2016 : 3,6% APBD Tahun 2017 : 4,2% APBD Tahun 2018 : 5% APBD
5	1	2	Meningkatnya Nilai Swadaya Masyarakat dalam Stimulan / Bantuan RW	Prosentase Swadaya Masyarakat sebesar 10 % terhadap jumlah bantuan RW	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Laporan hasil kegiatan	Tahun 2013 : 3% Tahun 2014 : 4% Tahun 2015 : 5,5% Tahun 2016 : 7% Tahun 2017 : 8,5% Tahun 2018 : 10%

No	Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan		
Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup								
6	1	1	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permakaman	luas ruang terbuka hijau publik menuju 12 % pada akhir tahun 2018	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Laporan hasil kegiatan	Tahun 2013 : 9,8% Tahun 2014 : 10,2% Tahun 2015 : 10,6% Tahun 2016 : 11,1% Tahun 2017 : 11,6% Tahun 2018 : 12%
6	1	2	Terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi SDA dan LH (rata-rata outcome)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Laporan hasil kegiatan	
				Prosentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Baku Mutu Lingkungan (jumlah pelaku usaha yang taat terhadap baku mutu lingkungan dibagi jumlah pelaku usaha yang dipantau di kali 100%)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Laporan hasil kegiatan	

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				Meningkatnya pelayanan Konservasi SDA (Rata-rata Outcome)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Laporan hasil kegiatan	
				Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (rata-rata outcome)	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup	Laporan hasil kegiatan	
6	1	3	Meningkatnya pengelolaan sampah dan sumber sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta peningkatan kapasitas TPA	Cakupan wilayah layanan kebersihan dan pengangkutan persampahan sebanyak 80%	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 70% Tahun 2014 : 72% Tahun 2015 : 74% Tahun 2016 : 76% Tahun 2017 : 78% Tahun 2018 : 80%
6	2	1	Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yg mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Panjang jalan kondisi baik/panjang jalan total Tahun 2013 : 96,80% Tahun 2014 : 97,44% Tahun 2015 : 98,10% Tahun 2016 : 98,74% Tahun 2017 : 99,38% Tahun 2018 : 100%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Jumlah jembatan kondisi baik/jumlah jembatan total Tahun 2013 : 90% Tahun 2014 : 92% Tahun 2015 : 94% Tahun 2016 : 96% Tahun 2017 : 98% Tahun 2018 : 100%
6	2	2	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 18 titik Tahun 2014 : 17 titik Tahun 2015 : 16 titik Tahun 2016 : 14 titik Tahun 2017 : 12 titik Tahun 2018 : 10 titik
6	2	3	Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik 92% menjadi 100%	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 92% Tahun 2014 : 92% Tahun 2015 : 94% Tahun 2016 : 96% Tahun 2017 : 98% Tahun 2018 : 100%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
				Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 65% Tahun 2014 : 67,29% Tahun 2015 : 69,58% Tahun 2016 : 71,87% Tahun 2017 : 74,16% Tahun 2018 : 76,45%
6	2	4	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 4% Tahun 2014 : 8% Tahun 2015 : 11% Tahun 2016 : 14% Tahun 2017 : 17% Tahun 2018 : 20%
6	3	1	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : Tidak ada data Tahun 2014 : 0 kasus Tahun 2015 : 0 kasus Tahun 2016 : 0 kasus Tahun 2017 : 0 kasus Tahun 2018 : 0 kasus
6	4	1	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 20 %	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 30% Tahun 2014 : 28% Tahun 2015 : 26% Tahun 2016 : 24% Tahun 2017 : 22% Tahun 2018 : 20%

No			Sasaran	IKU	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
6	4	2	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni menjadi 10.000 rumah	Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 18.456 rumah Tahun 2014 : 16.756 rumah Tahun 2015 : 15.056 rumah Tahun 2016 : 13.356 rumah Tahun 2017 : 11.656 rumah Tahun 2018 : 10.000 rumah
6	4	3	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Cakupan wilayah pelayanan angkutan umum	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	Laporan monev kegiatan	Tahun 2013 : 80% Tahun 2014 : 82% Tahun 2015 : 84% Tahun 2016 : 86% Tahun 2017 : 88% Tahun 2018 : 90%

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 - 2018

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD ATAS NAMA WALIKOTA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (...nama SKPD.....) KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...) dengan Keputusan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1.;;
2.;;
3. dst.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...) Kota Cirebon Tahun 2014-2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPD...) Kota Cirebon dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD...) Kota Cirebon Tahun 2013 - 2018.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014-2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal

a.n. WALIKOTA CIREBON
KEPALA (...nama SKPD.....)
KOTA CIREBON,

NAMA

WALIKOTA CIREBON
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA CIREBON
 NOMOR : 5 TAHUN 2015
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018

FORMAT IKU SKPD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD) a.n. WALIKOTA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama SKPD) TAHUN 2014 – 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (...nama SKPD)

Tugas Pokok :
 Fungsi :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja					Sumber Data	Keterangan
Sasaran RPJMD yang Diacu	Sasaran Renstra SKPD		2014	2015	2016	2017	2018		

a.n. WALIKOTA CIREBON
 KEPALA (...nama SKPD.....)
 KOTA CIREBON,

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
 ttd,
 ASEP DEDI

YUYUN SRIWAHYUNI P
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19591029 198603 2 007

WALIKOTA CIREBON
 WAKIL WALIKOTA,
 ttd,
 NASRUDIN AZIS